Look East Policy India dan Usaha Pembendungan Tiongkok

Prita Fitri Wijayanti

ABSTRAK

Look East Policy adalah kebijakan luar negeri India pada tahun 1991 sebagai upaya pemerintah India untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan kerjasama keamanan dengan negara-negara lain. Namun, India lebih banyak melakukan kerjasama bilateral yang komprehensif dengan Jepang dan Korea Selatan dibandingkan dengan Tiongkok yang justru berpotensi lebih besar untuk memberikan keuntungan bagi India. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa India memilih lebih banyak menjalin kerjasama bilateral yang komprehensif dengan Jepang dan Korea Selatan dibandingkan dengan Tiongkok. Dengan menggunakan teori Balance of Threat, artikel berargumen bahwa India lebih banyak menjalin kerjasama bilateral yang lebih komprehensif dengan Jepang dan Korea Selatan karena Tiongkok memiliki kemampuan ofensif lebih besar dan bertindak agresif sehingga membuat India merasa terancam. Kemudian India mengadopsi pilihan hedging strategy yang banyak melibatkan Jepang dan Korea Selatan untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok.

Kata-kata Kunci: *Look East Policy, hedging strategy, balance of threat*

Look East Policy was India's foreign policy in 1991 with intention to increase economic integration and security cooperation with other countries. However, India has more bilateral comprehensive cooperation with Japan and South Korea compare to China. Question rised is why India chose Japan and South Korea instead of China in order to implement its look east policy. By using the Balance of Threat theory, article argues that China has a greater offensive capabilites and act aggressively, so India feels threatened. As a result, India adopted a hedging strategy which involve Japan and South Korea to face China threat.

Keywords: *Look East Policy, hedging strategy, balance of threat*

Di bawah kepemimpinan Narasimha Rao, India telah mencetuskan *Look East Policy* sebagai kebijakan luar negerinya. Menurut G.V.C. Naidu ada tiga pilar penting dalam *Look East Policy*, yaitu memperbarui hubungan politik, meningkatkan interaksi ekonomi, dan menjalin hubungan pertahanan dengan negara-negara lain (1986, dalam Haokip 2011). Pada awal pelaksanaannya, ruang lingkup *Look East Policy* hanya meliputi kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, India memperluas ruang lingkupnya hingga Asia Timur dan Australia pada tahun 2003. Perluasan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Treaty of Amity and Cooperation yang merupakan prasyarat untuk menjadi anggota East Asia Summit (EAS) pada 8 Oktober 2003 (Ghoshal 2012). Diperluasnya *Look East Policy* tersebut mendorong India memperdalam keterlibatannya dengan negara-negara Asia Timur, baik secara multilateral maupun bilateral.

Secara multilateral, India menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Timur melalui EAS yang pertama kali mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur pada 14 Desember 2005 (Kondapalli 2010). Secara bilateral, India lebih banyak berfokus pada Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun, ada perbedaan perilaku India terhadap hubungan bilateral dengan ketiga negara tersebut, terutama terhadap Tiongkok padahal secara statistik Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar India. Tiongkok berada di peringkat ketiga sebagai negara tujuan ekspor India dan menyumbang sebesar 7,81% dari total ekspor India pada tahun 2010-2011. Sedang Jepang menduduki peringkat ke-12 dan Korea Selatan berada di peringkat ke-15. Tiongkok bahkan menduduki peringkat pertama sebagai negara importir India yang menyumbang 11,76% dari total impor India pada periode yang sama. Jepang berada di peringkat 15 dan Korea Selatan berada di peringkat ke-10 (Manshu 2012).

Kondisi ini seharusnya berpotensi untuk memberikan India keuntungan yang lebih besar apabila India dan Tiongkok menyepakati perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas akan mendorong meningkatnya total perdagangan kedua negara karena pengurangan dan penghapusan tarif yang ada. Namun, India justru tidak mencapai kesepakatan tersebut dengan Tiongkok dan

menyepakati hubungan ekonomi yang komprehensif dengan Jepang dan Korea Selatan yang menyumbang sedikit dari total perdagangan India.

Teori *Balance of Threat* dan Strategi Kerjasama Negara

Teori *balance of threat* memodifikasi teori *balance of power* yang berasumsi bahwa suatu negara akan mencegah dominasi kekuatan negara lain dengan cara menyeimbangi kekuatan negara tersebut dalam rangka menentangnya (Waltz 1979, dalam Bock dan Henneberg 2013). Sementara itu, Stephen Walt melalui teori *balance of threat* berasumsi bahwa negara tidak bereaksi terhadap kekuatan negara lain, melainkan pada ancaman (1987, dalam Bock dan Henneberg 2013).

Menurut Walt ada empat indikator yang menjadikan suatu negara dianggap sebagai sumber ancaman (1990, dalam Bock dan Henneberg 2013). Pertama, agregat kekuatan yang merupakan total sumber daya suatu negara. Semakin besar agregat kekuatan, semakin besar ancaman negara dapat timbul. Kedua, kedekatan geografis mengacu pada jarak negara yang terancam dengan negara pengancam. Semakin besar jarak, semakin terbatas untuk memproyeksikan kekuatan sehingga semakin terbatas pula potensi ancaman dan sebaliknya. Ketiga, kemampuan ofensif mengacu pada kombinasi agregat kekuatan, kedekatan geografis, dan tindakan agresif. Semakin besar kemampuan ofensif suatu negara, maka ancaman yang ditimbulkan akan semakin besar. Keempat, persepsi ancaman suatu negara terhadap keagresifan negara lain. Semakin sering suatu negara menunjukkan tindakan agresif dengan kekuatan yang dimilikinya, maka persepsi ancaman terhadap negara tersebut semakin besar.

Untuk menghadapi ancaman dari negara lain, Baogang He (2012) menawarkan *hedging strategy*. Sayangnya, He tidak mendefinisikan secara detail mengenai *Hedging strategy*. Cheng-Chwee Kuik mendefinisikan *hedging* sebagai perilaku dimana suatu negara berusaha untuk merespon ancaman dengan mengejar pilihan kebijakan yang mengombinasikan strategi *balancing* dan *bandwagoning* untuk menghasilkan efek netral di bawah situasi yang penuh ketidakpastian dan resiko yang

tinggi (Kuik 2008). *Hedging strategy* dapat dilihat sebagai strategi yang mengkombinasikan unsur ketergantungan ekonomi dan kerjasama keamanan. Kuik telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan *hedging strategy* melalui pengenalan pilihan *risk-contingency* dan *return-maximising* (Kuik 2008).

Pilihan *risk-contingency* adalah pilihan yang dibutuhkan untuk mengurangi resiko tertentu, seperti ancaman militer atau ekonomi, yang berasal dari negara berkekuatan agresif. Pilihan ini lebih mengarah ke *balancing* dimana untuk mengurangi resiko maka suatu negara akan memilih bekerjasama dengan negara yang bukan menjadi sumber ancaman. Di sisi lain, pilihan *return-maximising* merupakan pilihan untuk memaksimalkan keuntungan dari negara berkekuatan agresif. Oleh karena itu, pilihan ini lebih cenderung mengarah ke penerimaan kekuatan negara pengancam atau *bandwagoning*. Pilihan-pilihan yang ada dalam *hedging strategy* Kuik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pertama, pilihan dalam *risk-contingency* yang terbagi menjadi dua pilihan. *Indirect balancing* merupakan pilihan dimana negara meningkatkan upaya-upaya militer untuk mengatasi ketidakpastian dari negara pengancam (Kuik 2008). *Indirect balancing* mengacu pada tindakan militer informal. Dalam hal ini, Cina dianggap sebagai ancaman ambigu yang belum tentu melakukan serangan sehingga negara yang terancam hanya akan membuat persiapan militer. *Dominance denial* merupakan pilihan yang bertujuan untuk mencegah atau menolak munculnya kekuatan dominan dari negara pengancam. Negara yang terancam akan mendekati kekuatan besar lainnya, mengembangkan hubungan mereka, dan memperkuat pengaruh diplomatik dengan negara-negara tersebut.

Kedua, pilihan *return-maximising* yang memiliki tiga pilihan. *Economic pragmatism* mengacu pada pilihan dimana negara berusaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, terlepas dari masalah politik yang mungkin ada di antara mereka (Kuik 2008). *Binding-engagement* yang diartikan bahwa suatu negara akan berusaha untuk bersosialisasi dan mengintegrasikan diri dengan negara pengancam untuk menetralisir kecenderungan adanya tindakan revisionis oleh negara pengancam. *Limited*

bandwagoning merupakan pilihan untuk menjalin kemitraan politik yang erat dengan negara pengancam. Kemitraan tersebut diwujudkan dalam pengakuan dan koordinasi kebijakan kebijakan luar negeri mengenai isu-isu selektif (Kuik 2008).

Dimulai dari teori *Balance of Threat* yang berasumsi bahwa negara bereaksi terhadap ancaman yang berasal dari kemampuan ofensif dan tindakan agresif negara lain. Untuk merespon ancaman tersebut, suatu negara akan memilih *hedging strategy* agar tetap mendapatkan keuntungan dari negara pengancam, sekaligus mengurangi resiko terhadap ancaman melalui kerjasama dengan negara lain. Negara dihadapkan pada pilihan *risk-contingency* yang diadopsi dengan cara meningkatkan kekuatan militer sendiri dan kerjasama keamanan dengan negara lain, serta membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara kekuatan utama di kawasan lain. Negara juga dihadapkan pada pilihan *return-maximising* yang diadopsi dengan cara membangun hubungan ekonomi dan diplomatik, serta koordinasi kebijakan mengenai isu-isu selektif dengan negara pengancam.

Ancaman Tiongkok terhadap India

Sebagaimana yang telah dituliskan pada penjelasan teori di atas, Walt menyatakan bahwa ada empat indikator yang menjadikan suatu negara dianggap sebagai sumber ancaman, yaitu agregat kekuatan, kedekatan geografis, kemampuan ofensif, dan persepsi ancaman terhadap keagresifan negara lain (Bock dan Henneberg 2013). Pertama, agregat kekuatan yang dilihat dari kekuatan ekonomi dan militer suatu negara. Semakin besar agregat kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara maka semakin besar potensi ancaman yang ditimbulkan. Dilihat dari kekuatan ekonomi, India dan Tiongkok merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi India mencapai 8,4% pada tahun 2003 dan menurun menjadi 3,2% pada tahun 2012, sedangkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menunjukkan *double-digit* dengan 10 persen pada tahun 2003 dan menurun menjadi 7,7% pada tahun 2012 (Mohanty 2014). Lebih tingginya angka pertumbuhan ekonomi Tiongkok menyebabkan kekuatan ekonomi Tiongkok lebih

unggul dibandingkan India. Tiongkok yang pada tahun 2003 menduduki peringkat ke-6 dalam urutan PDB terbesar sedunia naik ke peringkat ke-2 pada tahun 2012 dengan total PDB sebesar 10,09 triliun dolar AS (China Daily 2004). Sementara itu, India yang bahkan tidak menduduki peringkat dalam 10 besar PDB terbesar di dunia pada tahun 2003 telah naik ke peringkat ke-4 pada tahun 2012 dengan total PDB sebesar 4,06 triliun dolar AS (The Richest 2012). Hal tersebut juga menyebabkan Tiongkok lebih berpeluang besar dalam meningkatkan pengeluaran militernya.

Pengeluaran militer Tiongkok berhasil mencapai 76 miliar dolar AS pada tahun 2010 dan ditingkatkan menjadi 89,8 miliar dolar AS pada tahun 2011. Sebaliknya, India justru mengalami penurunan pengeluaran dana militer dari 38,2 miliar dolar AS menjadi 30,8 miliar dolar AS pada tahun 2010 (Prabhakar 2012). Kedua, kedekatan geografis mengacu pada jarak negara yang terancam dengan negara pengancam. Semakin besar jarak, semakin terbatas untuk memproyeksikan kekuatan sehingga semakin terbatas pula potensi ancaman dan sebaliknya. Sesuai dengan letak geografisnya, India dan Tiongkok merupakan negara yang berbatasan langsung. Tiongkok yang memiliki luas wilayah sebesar 9,6 juta km² telah menjadi negara tetangga terbesar bagi India. Keduanya juga berbatasan langsung dan berbagi garis perbatasan sepanjang 4.000 km.

Ketiga, kekuatan ofensif mengacu pada ukuran kemampuan ofensif yang dimiliki oleh suatu negara dimana kemampuan ini dapat dilihat dari agregat kekuatan, kedekatan geografis, dan tindakan agresif. Semakin besar kemampuan ofensif suatu negara, maka akan ancaman yang ditimbulkan akan semakin besar. Dapat dilihat bahwa agregat kekuatan Tiongkok yang diukur dari kekuatan ekonomi dan militer lebih unggul dibandingkan India. Di sisi lain, jarak geografis keduanya juga sangat dekat karena wilayah keduanya yang berbatasan langsung. Tiongkok juga telah menunjukkan keagresifannya melalui beberapa tindakan.

Tindakan agresif pertama dilihat dari banyaknya sengketa perbatasan antara India dan Tiongkok, diantaranya: (1) klaim Tiongkok atas Arunachal Pradesh pada tahun 1989, padahal

India – melalui Inggris – dan Tiongkok telah menyepakati Garis McMahon pada tahun 1914 dimana pada garis tersebut ditunjukkan bahwa Arunachal Pradesh menjadi bagian dari India. Sengketa ini semakin memanas ketika Tiongkok menuntut agar Perdana Menteri Singh tidak melakukan kunjungan ke wilayah tersebut dan dibalas dengan tuntutan India yang melarang Dalai Lama mengunjungi Provinsi Tawang (Dutta 2011) klaim India atas Aksai Chin pada tahun 1958 yang diakibatkan oleh proyek pembangunan Tiongkok yang mengganggu di perbatasan India-Tiongkok. Sengketa tersebut menyebabkan hubungan keduanya membeku hingga tahun 1970-an (Zhang dan Li 2013) tindakan Tiongkok yang membantu proyek Pakistan yang dilakukan di Kashmir dimana Kashmir merupakan wilayah yang sedang disengketakan antara India dan Pakistan. Padahal, Tiongkok telah menentang ADB memberikan bantuan pinjaman pada proyek di Arunachal Pradesh dengan alasan wilayah tersebut sedang disengketakan (Dutta 2011) sengketa Sungai Bhrahmaputra dimana Tiongkok berencana membangun pembangkit listrik dan pengalihan aliran air di hulunya sehingga dapat mengakibatkan India mengalami kekurangan aliran air dan banjir karena posisi hilir Sungai Bhrahmaputra berada di India (Mukherjee 2014).

Tindakan agresif kedua ditunjukkan pada persaingan keamanan energi di Samudera Hindia. Tiongkok menerapkan strategi "String of Pearls" yang dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) mengembangkan kemampuan angkatan laut dan udara di Samudera Hindia; (2) mengembangkan jaringan pipa dan transportasi darat sebagai alternatif; (3) mengembangkan pengaruh ekonomi dan politik yang cukup besar di negara-negara yang berada di kawasan Samudera Hindia (Brewster 2013). Tiongkok menerapkan strateginya dengan cara memberikan bantuan pembangunan infrastruktur pelabuhan pada negara-negara yang mengelilingi India, yaitu Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh (lihat Gambar 1). Pelabuhan-pelabuhan tersebut akan digunakan sebagai transit pengiriman energi dari Afrika dan Timur Tengah ke Tiongkok, serta untuk basis angkatan laut Tiongkok. Hal tersebut menyebabkan India terkepung dengan negara-negara yang telah dipengaruhi oleh Tiongkok.

Gambar 1. String of Pearls

(Sumber: Ali 2013)

Keempat, persepsi ancaman suatu negara terhadap keagresifan negara lain. Artinya, semakin sering suatu negara menunjukkan tindakan agresif dengan kekuatan yang dimilikinya, maka persepsi ancaman terhadap negara tersebut semakin besar. Persepsi ancaman India terhadap Tiongkok dapat dilihat melalui tanggapan India terkait konflik-konflik antara India dan Tiongkok. Terkait dukungan Tiongkok ke Pakistan pun, pemerintah India juga telah memberikan peringatan.

Pemerintah India telah mengungkapkan berbagai pernyataan waspada terhadap tindakan Tiongkok tersebut. Tanggapan publik India melalui penelitian Pew Global Attitudes Project pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa hanya 34% publik India yang mempercayai Tiongkok sebagai negara yang menguntungkan, sedangkan 52% menganggap bahwa Tiongkok merupakan negara yang berbahaya (Dutta 2011).

Berdasarkan empat indikator di atas maka dapat dibuktikan bahwa Tiongkok merupakan ancaman bagi India. Tiongkok memiliki kemampuan ofensif yang besar karena memiliki kekuatan ekonomi dan militer lebih besar dibandingkan India. Letak geografis Tiongkok juga sangat dekat, bahkan keduanya berbagi wilayah perbatasan dimana Tiongkok merupakan negara tetangga terbesar India. Selain itu, Tiongkok juga telah

melakukan berbagai tindakan agresif yang dapat memicu persepsi ancaman yang dapat dilihat dari pernyataan pemerintah maupun penilaian masyarakat melalui *polling*.

Hedging Strategy India terhadap Ancaman Tiongkok

Kuik mendefinisikan *hedging* sebagai perilaku dimana berusaha untuk merespon ancaman dengan mengejar pilihan kebijakan yang mengombinasikan *balancing* dan *bandwagoning* untuk menghasilkan efek netral di bawah situasi yang penuh ketidakpastian dan resiko yang tinggi. *Hedging strategy* sebagai strategi yang mengombinasikan unsur ketergantungan ekonomi dan kerjasama keamanan. Kuik kemudian memberikan gambaran penerapan *hedging strategy* melalui pengenalan pilihan *risk-contingency* dan *return-maximising*.

Pilihan *risk-contingency* terbagi menjadi dua pilihan. Pertama, *Indirect balancing* merupakan pilihan dimana suatu negara meningkatkan upaya-upaya militer yang dapat dicapai melalui modernisasi militer dan kerjasama keamanan dengan negara lain. India telah menjalin kerjasama keamanan dengan negara-negara kekuatan besar yang berada di kawasan Asia Timur. Kerjasama keamanan tersebut juga mendorong terjadinya modernisasi militer karena India juga melakukan transfer persenjataan. Kedua, pilihan *dominance denial* dimana negara yang terancam akan mendekati kekuatan besar lainnya, mengembangkan hubungan mereka, dan memperkuat pengaruh diplomatik dengan negara-negara tersebut. Dalam hal ini, India tidak hanya mendekati Jepang dan Korea Selatan melalui kerjasama keamanan, melainkan juga kerjasama ekonomi dan diplomatik. Secara detail kerjasama India dengan kedua negara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kerjasama India dengan Jepang dan Korea Selatan

India-Jepang	
2000	• Menandatangani "global partnership"
2001	• Menyepakati Comprehensive Security Dialogue dan konsultasi antar militer (Abe, dalam Panda 2012a).
2005	• Menandatangani "Japan-India Partnership in a New Asian Era: Strategic Orientation of Japan-India Global Partnerhsip" yang menggarisbawahi pentingnya dialog dan kerjasama keamanan. Dialog tersebut akan diselenggarakan secara rutin setiap tahun.
2006	• Membangun kerangka kerja "Strategic and Global Partnership". • Menandatangani MoU yang menyepakati diadakannya kunjungan rutin antar penjaga pantai.
2007	• Membangun kerangka kerja "New Dimensions to the Strategic and Global Partnership". • Jepang bergabung dalam Latihan Malabar yang diadakan oleh India dan Amerika Serikat. Latihan tersebut juga menyertakan Singapura dan Australia.
2008	• Membangun kerangka kerja "Advancement to the Strategic and Global Partnership" yang lebih fokus pada isu keamanan. • Membahas isu reformasi PBB dan memberikan dukungan satu sama lain. • Menandatangani "Japan-India Joint Declaration on Security Cooperation" yang menyepakati dialog 2+2 antar pejabat militer dan rutin diadakan setiap tahunnya.

2011	• Sejak tahun 2007-2011, bergabung dalam latihan militer trilateral dengan India dan Amerika Serikat. • Menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement.
2012	• Sejak tahun 2000, mengadakan latihan gabungan anti-pembajakan serta pencarian dan penyelamatan antara penjaga pantai India dan Jepang (Panda 2012a). • Menyepakati latihan gabungan antara MSDF Jepang dan angkatan laut India di wilayah lepas pantai Tokyo (Panda 2012a). • Melakukan latihan gabungan di Chennai. • Melakukan patroli gabungan di Selat Malaka dan Teluk Aden.
India-Korea Selatan	
2004	• Menandatangani "Long Term Cooperative Partnership for Peace and Prosperity" yang baru dilaksanakan pada tahun 2010 (Scott 2014).
2005	• Menyepakati MoU dalam kerjasama industri dan logistik pertahanan. • Menyepakati dialog antar pejabat militer yang diadakan rutin setiap tahunnya. • Menyepakati kerjasama pengembangan artileri masing-masing negara melalui *joint venture* dalam pembuatan peralatan militer
2006	• Menyepakati MoU penjaga pantai. • Latihan gabungan antara penjaga pantai kedua negara (Panda 2011).

2007	• Pembelian dan pengembangan 5.000 ton frigat, kendaraan lapis baja dan truk militer oleh India.
2009	• India menjadi pelanggan utama bagi *joint venture* Hyundai Heavy Indsutries Korea Selatan dan Lockheed Martin Amerika Serikat yang memproduksi kapal perang (Panda 2012b). • Menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement.
2010	• Menyepakati "strategic partnership" dengan pilar ekonomi, keamanan, dan energi. • Korea Selatan mendukung modernisasi persenjataan angkatan India dan sepakat menanggung bersama biaya 100 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan untuk program modernisasi tersebut. • Menandatangani MoU pertukaran informasi dan pengalaman pertahanan, pertukaran personel dan ahli untuk layanan pertahanan, pendidikan militer dan pelaksanaan latihan militer. • Menandatangani MoU untuk program R & D produk pertahanan negara.
2011	• Menyepakati pakta nuklir sipil. • Menyepakati diselenggarakannya KTT keamanan secara rutin setiap tahun.
2012	• Latihan gabungan di Busan. • Pembelian 8 kapal penyapu ranjau senilai 500 miliar dolar AS oleh India. • Perusahaan-perusahaan Korea Selatan juga berpartisipasi dalam berbagai tender di bawah akuisisi pertahanan India.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa India menjalin kerjasama bilateral yang cukup komprehensif dengan Jepang dan Korea Selatan. Dari segi hubungan diplomatik, hampir setiap tahunnya

India menyelenggarakan dialog strategis ataupun KTT secara bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan. Hal tersebut membuka kesempatan bagi India untuk terus mengembangkan kerjasama dalam berbagai isu dengan kedua negara tersebut. Jepang bahkan memberikan dukungan bagi India untuk menjadi anggota tetap dalam DK PBB.

Dari segi ekonomi, perdagangan India dengan Korea Selatan dan Jepang telah mengalami peningkatan sejak disepakatinya CEPA pada tahun 2010 dan 2011. Jepang juga memberikan ODA dimana India merupakan negara penerima ODA terbesar dari Jepang pada abad ke-21. Hampir 50% dari ODA Jepang dialokasikan untuk bidang energi dan transportasi. Selain itu, Jepang juga menyediakan bantuan untuk pembangunan koridor industri, infrastruktur ekonomi, pasokan air, dan IT (Joshi 2013).

Dari segi keamanan dan pertahanan, India memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jepang dan Korea Selatan. India telah melaksanakan latihan gabungan secara multilateral dan trilateral dengan negara-negara tersebut. Selain itu, Korea Selatan juga telah menjadi mitra India dalam program modernisasi keamanan dan pertahanan India. Program modernisasi tersebut dilaksanakan melalui kerjasama R&D atau pengembangan produk pertahanan melalui kerjasama industri peralatan militer.

Selain melakukan pendekatan pada Jepang dan Korea Selatan, India juga tercatat telah melakukan kerjasama dengan Tiongkok yang terbukti dianggap memberikan ancaman. Hal tersebut dapat dianalisis menggunakan pilihan *return-maximising* dalam *hedging strategy*. Ada tiga pilihan dalam *return-maximising*. Pertama, *economic pragmatism* mengacu pada pilihan dimana negara berusaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, terlepas dari masalah politik yang mungkin ada di antara mereka.

Hubungan perdagangan bilateral antara India dan Tiongkok telah dimulai sejak tahun 1978 dan keduanya menyepakati "Most Favoured Nation" pada tahun 1984. Namun, hubungan dagang ini baru mengalami perkembangan cepat sejak Tiongkok menjadi anggota WTO. Total perdagangan keduanya meningkat dari 2,7 miliar dolar AS pada tahun 2001 menjadi hampir 68,8 miliar dolar AS pada tahun 2012 (Mohanty 2014). Namun, hubungan investasi antara India dan Tiongkok

tidak berkembang secepat hubungan dagangnya. Tiongkok menempati urutan ke-10 sebagai investor di India. Total FDI Tiongkok di India pada periode 2004-2014 hanya mencapai 800 juta dolar AS, menyumbang 0,4% dari total FDI yang masuk ke India (Chaturvedi 2014).

Kedua, *binding engagement* yaitu upaya suatu negara untuk membangun dan memelihara komunikasi dengan negara pengancam. India telah berupaya untuk membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok sejak tahun 1954. Pelaksanaan hubungan diplomatik antara India dan Tiongkok pada abad ke-21 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hubungan Diplomatik antara India dan Tiongkok

India-Tiongkok	
2003	• Kunjungan PM Vajpayee ke Tiongkok. • Disepakatinya "Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation Between the Republic of India and the Peoples Republic of China" (Mansingh t.t). • Ditandatanganinya MoU terkait perluasan perbatasan perdagangan dengan membuka Nathu La di Sikkim. • Ditandatanganinya MoU terkait ekspor buah-buahan. • Ditandatanganinya MoU terkait pendidikan. • Dialog terkait isu perbatasan antara Penasehat Keamanan Nasional India Brajesh Mishra dan Wakil Menteri Tiongkok Dai Bingguo. • Pertukaran delegasi militer untuk mengurangi kesalahpahaman dan bentrok di wilayah LAC.

2005	• PM Wen Jiabao berkunjung ke India dan mendeklarasikan "strategic and cooperative partnership for peace and security" • Disepakatinya perjanjian terkait parameter politik dan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan (Mohanty 2005). • Ditandatanganinya MoU kepabeanan, dialog keuangan, dan persyaratan sanitary untuk ekspor labu dan anggur India ke Tiongkok.
2006	• Presiden Hu Jintao berkunjung ke India dan menyepakati "Joint Declaration". • Disepakatinya BIPPA (Jetly 2006) dan perluasan mekanisme dialog *counter-terrorism*. • Ditandatanganinya MoU untuk melakukan eksplorasi bersama, produksi dan akuisisi perusahaan minyak dan gas alam di negara ketiga.
2008	• Ditandatanganinya "A Shared of Vision for the 21st Century". • Latihan gabungan melawan terorisme di India (Arif 2013).
2010	• Perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara India dan Tiongkok • Membentuk Strategic Economic Dialogue dan forum presiden direktur perusahaan-perusahaan India dan Tiongkok (Pandit et al 2011). • Menyepakati tahun 2011 sebagai tahun pertukaran antar organisasi masayarakat, pemuda, media, akademis, seniman, dan budayawan • Menandatangani MoU terkait Bursa Media dan program pertukaran budaya untuk 2011-2012.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hubungan diplomatik yang dilakukan melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah India dan Tiongkok lebih banyak berfokus pada isu ekonomi. Oleh karena itu, penulis menganalisis bahwa India tidak begitu mengintegrasikan diri dengan Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah India justru gagal mempengaruhi kebijakan Tiongkok terkait isu perbatasan sehingga kedua negara masih belum mencapai kesepakatan terkait isu perbatasan.

Dalam forum multilateral, penulis menemukan interaksi yang sejalan antara kebijakan India dan Tiongkok hanya dalam forum WTO dimana keduanya bersama Brazil dan Afrika Selatan sepakat untuk sama-sama mendukung kepentingan negara berkembang (Mansingh t.t). Di sisi lain, India dan Tiongkok justru banyak terlibat ketegangan dalam forum multilateral lainnya. Pertama, Tiongkok mencegah India menjadi anggota EAS pada tahun 2005. Kedua, Tiongkok menolak keanggotaan India dalam NSG. Ketiga, India menentang keanggotaan Tiongkok dalam SAARC. Terkait dengan isu reformasi PBB pun, Tiongkok telah memberikan dukungan bagi India untuk terlibat secara aktif dalam PBB. Namun, Tiongkok tidak memberikan kepastian dan kejelasan dukungan terhadap keinginan India untuk menjadi anggota tetap DK PBB (Mohanty 2005).

Ketiga, *limited bandwagoning* merupakan pilihan untuk menjalin kemitraan politik yang erat dengan negara pengancam. Kemitraan tersebut diwujudkan dalam pengakuan dan koordinasi kebijakan luar negeri mengenai isu-isu selektif. Dalam kasus yang India dan Tiongkok, penulis memilih isu-isu kedaulatan sebagai ukuran kemitraan keduanya. Dari berbagai sengketa perbatasan yang telah dianalisis penulis di atas, terbukti bahwa India dan Tiongkok tidak saling mengakui kedaulatan wilayah masing-masing negara dan justru terlibat konflik karena hal tersebut. Selain itu, Perdana Menteri India juga menyebutkan bahwa India hanya akan mengakui "One China Policy" apabila Tiongkok juga mengakui Kashmir sebagai bagian integral dari India. Namun, Tiongkok menolak penawaran tersebut karena hubungan dekatnya dengan Pakistan (Panda 2014, dalam The Diplomat 2014).

Studi kasus mengenai hubungan India dengan Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan secara jelas mengindikasikan bahwa India menerapkan *hedging strategy* terhadap Tiongkok. Seperti yang telah dipaparkan dalam analisis sebelumnya, maka penulis menggambarkan penerapan pilihan-pilihan *hedging strategy* oleh India sebagai berikut:

Pada analisis di atas, ditemukan bahwa India mengadopsi pilihan *risk-contingency* secara penuh dilihat dari hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan antara India dengan Jepang dan Korea Selatan. Di sisi lain, India tidak mengadopsi semua pilihan *return-maximising* secara penuh. India hanya mengadopsi pilihan *economic-pragmatism* yang ditunjukkan melalui hubungan dagang dan investasi. Selain itu, India juga berupaya memaksimalkan keuntungan ekonomi melalui berbagai perjanjian terkait dengan perdagangan dan investasi. India tidak mengadopsi pilihan *binding engagement* secara penuh. India hanya berupa membangun dan memelihara komunikasi dengan Tiongkok melalui hubungan bilateral, namun India lebih banyak terlibat ketegangan dalam forum multilateral dimana kedua negara menjadi anggota di dalamnya. Dalam pilihan *limited bandwagoning*, India sama sekali tidak menunjukkan pengakuan dan koordinasi kebijakan luar negeri dengan Tiongkok. Hal tersebut dibuktikan melalui berbagai isu sengketa perbatasan yang menunjukkan bahwa keduanya tidak menghormati kedaulatan wilayah satu sama lain.

Simpulan

India menganggap Tiongkok sebagai ancaman karena Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang jauh lebih besar dibanding India. Letak geografis yang berbatasan langsung juga menyebabkan Tiongkok memiliki kesempatan yang besar untuk menyerang India. Di sisi lain, Tiongkok telah bertindak agresif melalui klaim-klaimnya atas wilayah perbatasan, dukungannya pada Pakistan dalam sengketa perbatasan antara Pakistan dan India, persaingan keamanan energi di Samudera Hindia dimana Tiongkok berupaya mendapatkan dukungan dari negara-negara sekitar India, dan penolakan Tiongkok atas keanggotaan India dalam berbagai forum multilateral.

Menanggapi ancaman tersebut, India menerapkan *hedging strategy* dengan lebih banyak mengadopsi pilihan *risk-contingency* yang ditunjukkan melalui hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi dan keamanan India yang komprehensif dengan Jepang dan Korea Selatan. Hubungan tersebut berdampak pada banyaknya dukungan yang didapat oleh India dari kedua negara tersebut dalam isu internasional dimana Tiongkok menjadi penghambatnya. Di sisi lain, India juga mengadopsi pilihan *return-maximising* untuk mendapatkan keuntungan dari Tiongkok. Namun, kerjasama yang terjalin hanya berfokus pada isu ekonomi dan hubungan diplomatik untuk menyelesaikan sengketa perbatasan.

Daftar Pustaka

Arif, Sheikh Mohd, 2013. "A History of Sino-Indian Relations: From Conflict to Cooperation", *International Journal of Political Science and Development*, 1(4): 129-137.

Bock, Andreas M., dan Henneberg, Ingo *Why Balancing Fails: Theoretical Reflections on Stephan M. Walt's "Balance of Threat" Theory*. Jerman: University of Augsburg.

Brewster, David, 2013. *Looking beyond the String of Pearls: Indian Ocean is Where India Holds A Clear Advantage Over China.* [online] dalam www.cuhk.edu.hk/hkiaps/...indian/article186.pdf [diakses pada 9 Juni 2015].

Chaturvedi, Saurabh, 2014. *Is China Ready to Step Up and Invest in India?*. [online] dalam wsj.com/indiarealtime/2014/09/17/ is-china-ready-to-step-up-and-invest-in-india/ [diakses pada 28 Juni 2015].

China Daily, 2004. *IMF: China's GDP ranks No. 7.* [online] dalam http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-05/19/ content_332004.htm [diakses pada 30 Juli 2015].

Dutta, Sujit, 2011. "Managing and Engaging Rising China: India's Evolving Posture", *The Washington Quarterly,* 34 (2): 127-144.

Ghoshal, Baladas, 2012. "India's Look East Policy: From Economic Integration to Strategic Stakeholder in the Asia Pacific Region", *ISIS Focus No. 9*. Malaysia: ISIS International Affairs Forum.

Haokip, Thongkholal, 2011. "India's Look East Policy: Its Evolution and Approach", *South Asian Survey,* 18(2): 239-57.

He, Baogang, 2012. "Politics of accommodation of the Rise of China : the case of Australia" *Journal of Contemporary China,* 21 (73): 53-70.

Jetly, Rajshree, 2006. *The Visit of Chinese President, Hu Jintao, to India (20-23 November 2006)*. Singapura: Institute of South Asian Studies.

Joshi, Sanjana, 2013. "The Geopolitical Context of Changing Japan-India Relations", *UNISCI Discussion Papers,* No. 32.

Kondapalli, Srikanth, 2010. "India's Interactions with East Asia: Opportunities and Challenges", *International Studies,* 47 (2-4): 305-321.

Kuik, Cheng-Chwee, 2008. "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China", *Contemporary Southeast Asia,* 30(2): 159-185.

Manshu, 2012. *India's Major Trading Partners in 3 Charts.* [online] dalam http://www.onemint.com/2012/01/16/indias-major-trading-partners-in-3-charts/ [diakses pada 22 Juni 2015].

Mansingh, Surjit, t.t. "India-China Relations in the Context of Vajpayee's 2003 Visit", *The Sigur Center Asia Papers*. Washington DC: The George Washington University.

Mohanty, Manoranjan, 2005. "Panchsheel Partners: India and China Make a New Beginning". Paper dipresentasikan di *Third High-Level Conference on Building a New Asia: Towards an Asian Economic Community*, Taiyuan, Cina, 15-16 September.

Mohanty, S. K, 2014. *India-China Bilateral Trade Relationship*. New Delhi: Research and Information System for Developing Countries.

Mukherjee, Amitava, 2014. *China and India: River Wars in the Himalayas* [online] dalam http://www.geopoliticalmonitor.com/china-and-india-river-wars-in-the-himalayas-4954/ [diakses pada 1 Juli 2015].

Panda, Rajaram, 2011. "India-Republic of Korea Military Diplomacy : Past and Future Projections", *Journal of Defence Studies,* 5 (1): 16-38.

_____, 2012a. "India-Japan Defence Partnership", *Indian Foreign Affairs Journal,* 7 (3): 311-320.

_____, 2012b. "India and South Korea Relations: Past and Future Trends", *Portuguese Journal of International Affairs*.

Portugal: Portueguese Institute of International Relations and Security.

Pandit, Priyanka, et al, 2011. "Wen Jiabao's India visit: A Strategic Review", *IDSA Issue Brief*, hlm. 1-10.

Prabhakar, Binoy, 2012. *How India compares with China in Military Prowess.* [online] dalam http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-11/news/31143348_1_defence-budget-china-sea-south-china [diakses pada 21 Juni 2015].

Scott, David, 2014. "Chapter 8: India-South Korea Strategic Convergence and Security-Defense Cooperation: A Useful Relationship in the Indo-Pacific", *On South Korea–India Strategic Cooperation*. Korea Selatan: Kyungnam University Press, hlm. 305-329.

The Diplomat, 2014. *New Delhi Will Recognize 'One China' When Beijing Recognizes 'One India'.* [online] dalam http://thediplomat.com/2014/09/new-delhi-will-recognize-one-china-when-beijing-recognizes-one-india/ [diakses pada 28 Juli 2015].

The Richest, 2012. *The World's Largest Economies 2012.* [online] dalam http://www.therichest.com/rich-list/world/worlds-largest-economies/ [diakses pada 28 Juli 2015].

Zhang, Hongzhou, dan Li, Mingjiang, 2013. "Sino-Indian Border Disputes", *Analysis*, No. 181.